



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
Jln. Jend. Sudirman No. 18 Telepon (0532) 21195 Fax : 21504  
PANGKALAN BUN 74111

Pangkalan Bun, 11 Oktober 2021

Kepada  
Yth. Sekretaris Daerah  
Kabupaten Kotawaringin Barat  
di –  
Pangkalan Bun

**SURAT PENGANTAR**

NOMOR : 300/375 /Kesbang. I/2021

No.	Jenis yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Bersama ini kami sampaikan Laporan Keikutsertaan Mengikuti Webinar yang diselenggarakan oleh Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) dengan tema "Memahami Pentingnya Etika Penyelenggaraan Negara".	1 (satu) berkas	Disampaikan dengan hormat untuk dapat diketahui dan bahan seperlunya.

Diterima tanggal .....

Pengirim

Penerima  
Jabatan : .....

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,**

Nama : .....  
Pangkat : .....  
NIP. : .....

  
**Drs. EDIE FAGANTI**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19650802 199403 1 010



## LAPORAN TENTANG KEIKUTSERTAAN MENGIKUTI WEBINAR DENGAN TEMA “MEMAHAMI PENTINGNYA ETIKA PENYELENGGARAAN NEGARA”

### I. Pendahuluan.

#### A. Umum/latar belakang

Etika pemerintahan berhubungan dengan keutamaan-keutamaan yang harus dilaksanakan oleh para pejabat dan pegawai atau aparatur pemerintahan. Oleh karena itu dalam etika pemerintahan membahas perilaku penyelenggara pemerintahan, terutama penggunaan kekuasaan, wewenang termasuk legitimasi kekuasaan dalam kaitannya dengan tingkah laku yang baik atau buruk.

Alasan fundamental mengapa etika pemerintahan penting diperhatikan dalam pengembangan pemerintahan yang efisien, tanggap, dan akuntabel yaitu karena masalah yang dihadapi oleh pemerintahan saat ini dan ke depan semakin kompleks.

Modernitas masyarakat yang semakin meningkat, ini telah melahirkan berbagai masalah - masalah publik yang semakin banyak dan kompleks dan harus diselesaikan oleh pemerintah. Bangsa Indonesia sedang menghadapi era new normal dan disrupsi yang penuh dengan ketidakpastian.

#### B. Maksud dan Tujuan

Etika Penyelenggara Negara diperlukan untuk mewujudkan penyelenggara negara yang baik, etis, amanah, berakhlak mulia, mencegah niat/perilaku yang menyimpang (nilai, norma, aturan) dalam penyelenggaraan tugas kenegaraan, dalam upaya mewujudkan etika penyelenggaraan negara yang sesuai dengan prinsip dan cita-cita bangsa.

### II. Kegiatan yang dilaksanakan,

Berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor : 060/252/ORGS tanggal 7 Oktober 2021 hal Undangan Webinar, maka telah diikuti webinar yang diselenggarakan oleh Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) dengan tema “Memahami Pentingnya Etika Dalam Penyelenggaraan Negara” secara virtual yang telah dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal	: Sabtu, 9 Oktober 2021
Waktu	: Pukul 10.00 WIB s/d 12.40 WIB
Media Webinar	: 1. Aplikasi Zoom Meeting Meeting ID : 80 9530 1332 Passcode : MIPI21
Narasumber	: 2. Channel Youtube Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia 1. Prof. R. Siti Zuhro (MIPI dan BRIN). 2. Prof. Dr. Eko Prasajo (Guru Besar FIA/Sekretaris Eksekutif KPRBN). 3. Dr. Drs. Muhadam Labolo, AMP,MSI.CIGS (Divisi Pengembangan Ilmu MIPI).
Host	: Aprilia Putri (Anggota MIPI)

### II. Hasil yang dicapai,

Adanya kesadaran akan norma hukum dan norma etika penyelenggara negara yang tercermin melalui sikap, perilaku, tindakan dan ucapan yang etis akan menghasilkan penyelenggara negara yang amanah, disiplin, teladan, dan berakhlak mulia sesuai dengan cita-cita bangsa.

Kriteria seorang aparatur berperilaku etis di dalam bertugas ditentukan sejauh mana yang bersangkutan secara sadar dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepadanya, yaitu dalam rangka memenuhi fungsi dan misi pemerintahan, yaitu pelayanan, pengayoman, dan pemberdayaan masyarakat.

### III. Kesimpulan dan Saran

Dapat disimpulkan bahwa etika penyelenggara negara diperlukan untuk kemanfaatan warga masyarakat, meningkatkan kepercayaan publik, memajukan perekonomian, mengurangi KKN, menjaga stabilitas sosial dan meningkatkan prinsip rule of law.

Terbitnya UU tentang etika penyelenggara Negara bisa jadi solusi terbaik yang memberikan kekuatan hukum bagi para penyelenggara negara dalam menjalankan tugasnya.

### IV. Penutup.

Etika yang harus ditaati oleh seorang aparatur pada dasarnya merupakan upaya menjadikan moralitas sebagai landasan bertindak dan berperilaku dalam kehidupan bersama termasuk di lingkungan profesi administrasi.

Berdemokrasi dan berpemerintahan yang berlandaskan Pancasila tidak hanya berpegang pada kaidah hukum, tetapi juga pada kesadaran dan kepatutan moral yang mengedepankan etika nilai-nilai Pancasila.

Bangsa Indonesia perlu konsisten dalam mengamalkan Pancasila, terutama Sila kedua "kernusiaan yang adil dan beradab" dalam bentuk rasa malu dan siap mundur ketika dirinya melanggar etika/moral dan hukum. Budaya malu dan mundur ini sangat relevan, signifikan dan urgen diterapkan oleh Indonesia di saat negeri ini terpuruk.

Dibuat di Pangkalan Bun  
pada tanggal 11 Oktober 2021

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,**



**Drs. EDIE FAGANTI**  
**Pembina Tingkat I**  
**NIP. 19650802 199403 1 010**